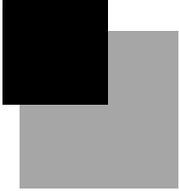




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga KPU Kabupaten Gunung Mas dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja KPU kabupaten Gunung Mas tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas mengacu pada dokumen perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

Secara Substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) KPU Kabupaten Gunung Mas merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Pencapaian kinerja, isi Laporan Kinerja pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelola sumberdaya dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Gunung Mas selain itu penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisa capaian kinerja.

Akhir kata semoga Laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelola dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan kepemiluan khususnya di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, 05 Januari 2025

Ketua,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai pengemban amanat UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban dalam mendukung visi dan misi KPU. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu dan Pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
5. Meningkatkan kualitas Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu dan Pemilihan yang demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
3. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh peserta Pemilu dan Pemilihan : Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Undang-Undang;
4. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
5. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilihan yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan);
2. Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna).

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, pengadaan logistik tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan harga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang, KPU Kabupaten Gunung Mas akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;

2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.

KETUA,



ELFRINIS G. TUMON

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan	1
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2020–2024	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	18
C. Penetapan Kinerja Tahun 2024	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	24
B. Pengukuran dan Analisis Kinerja Tahun 2024	25
C. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
D. Pengukuran dan Analisis Kinerja Tahun 2024	32
BAB IV. PENUTUP	34
<u>GAMBAR</u>	
Gambar 1. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas	12
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas	12
<u>TABEL</u>	
Tabel 2.1 Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	19
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	21
Tabel 3.1 Target Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan rahasia dalam suatu negara kesatuan. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Pemerintah/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, Pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Otoritas KPU/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di daerah sebagai berikut: Kabupaten/Kota. KPU menyelenggarakan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. KPU Kabupaten menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, mengedukasi pemilih dan mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan fungsi dan mencapai efisiensi operasional dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai organisasi yang menggunakan anggaran negara untuk menjalankan fungsi dan kegiatannya, serta organisasi yang mengedepankan sistem terbuka, transparan, akuntabel dan akuntabel, telah disusun Laporan Hasil Kegiatan KPU Kabupaten Gunung Mas.

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan tentang kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas tahun 2023, kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan kesepakatan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur dan menggambarkan seberapa sukses capaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas pada tahun 1 (satu tahun). Analisis kinerja terhadap sasaran kinerja yang direncanakan digunakan sebagai pos pemeriksaan yang memberikan hasil, untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

B. KEDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat 3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten Gunung Mas berada di wilayah kerja Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

C. TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan wewenang meliputi :

- a. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 7) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - 8) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
 - 10) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan mengumumkannya;
 - 11) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten yang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - 12) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panawaslu Kabupaten;
 - 13) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 14) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 15) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - 16) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di tingkat Kabupaten;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;

- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - 10) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
 - 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati;
 - 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;

- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- 9) Menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten yang bersangkutan;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
- 12) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
- 13) Melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU dan KPU Provinsi;
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Banwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Banwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;
- 17) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
- 19) Menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati, dan DPRD Kabupaten; dan
- 20) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam setiap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati secara adil dan setara;

- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat Kabupaten;
- 11) Melaksanakan keputusan DKPP;
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten Gunung Mas melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;

- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

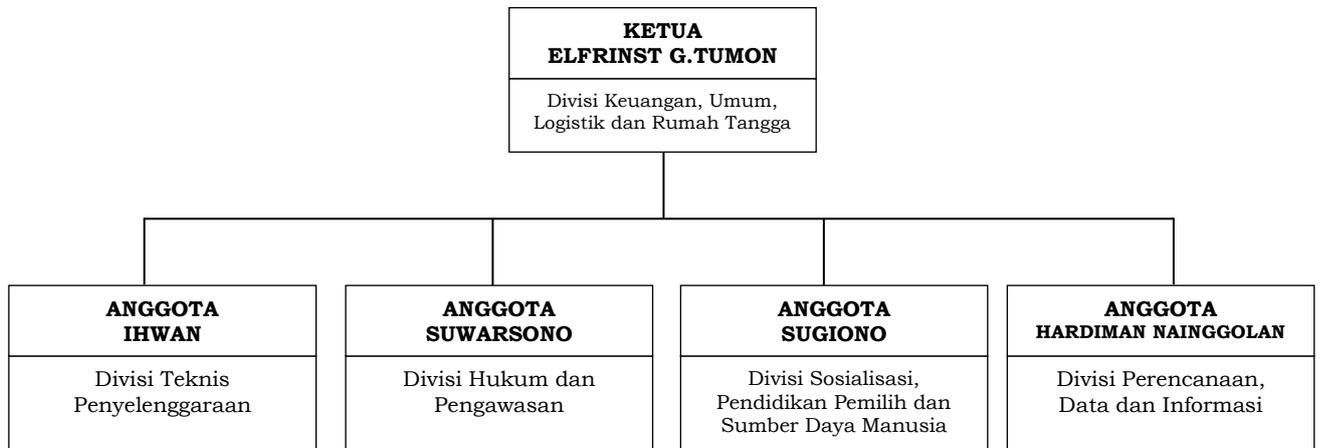
Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas berwenang untuk :

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

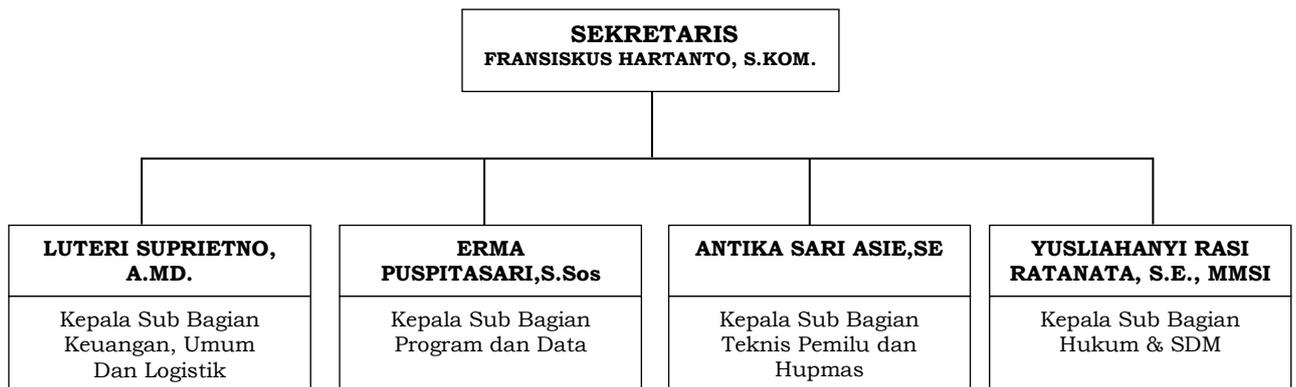
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunung Mas

Gambar 1.



Gambar 2

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja 2024 KPU Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penjelasan tentang Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada bab ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja organisasi serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap badan/organisasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan wajib menyusun rencana strategis (Renstra).

Sehubungan dengan itu, KPU Daerah Gunung Mas telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Gunung Mas No.

01.a/PR.01.3-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Gunung Mas Tahun 2020 - 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi KPU Kabupaten Gunung Mas adalah *“menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.”*

Pernyataan visi tersebut memiliki beberapa kata kunci sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu : mandiri, profesional dan Mandiri. Pemahaman atas kata kunci tersebut akan memberikan makna yang menyeluruh dan mendalam tentang visi KPU. Dibawah ini akan dijelaskan makna tersebut :

- 1) Pemilu yang Berintegritas : penyelenggara Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam pelaksanaan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kewibawaan lembaga;
- 2) Pemilu yang Profesional : penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pada kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas kerja yang maksimal dalam pelaksanaan Pemilu;

- 3) Pemilu yang Mandiri : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan segala keputusan dan kebijakannya.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU Kabupaten Gunung Mas dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya tugas dan fungsi pokok (*core competency*), yaitu penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan Demokrasi. Untuk menjabarkan visi tersebut, KPU Kabupaten Gunung Mas menyusun misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020 – 2024. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- 2) Menyusun regulasi kepemiluan yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- 6) Meningkatkan integritas penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesabel.

Selain itu, untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dirumuskan dalam bentuk yang lebih terkendali dan fungsional berupa perumusan tujuan organisasi. Sasaran adalah pelaksanaan gagasan operasional yang dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan merumuskan tujuan tersebut, KPU Kabupaten Gunung Mas dapat mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi dan misi

lainnya untuk periode ini, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Gunung Mas adalah :

- 1) Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gunung Mas yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesibel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya diimplementasikan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan dialokasikan dalam jangka waktu tersebut secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Gunung Mas yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024 adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikatornya adalah :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya;

- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
- 2) Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategisnya adalah :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.
- 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator adalah :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

KPU Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA
1	2	3
I	Program Dukungan Manajemen	
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik (3355)	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai serta pengelolaan barang milik negara KPU Kabupaten Gunung Mas
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana dan Prasarana (3360)	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
II	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
1	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
2	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc
3	Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6870)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Masa Kampanye Pemilu
4	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
5	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara
6	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam dukungan proses pelaksanaan Sumpah Janji
7	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Menetapkan Hasil Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas

**Tabel 2.1 - Rencana Kerja Program Dukungan Manajemen
dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi**

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)		
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik (3355) dan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana dan Prasarana (3360)			
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3	Terlaksananya Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara	Tersedianya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai Data SAK	100%
4	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
II	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)		
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik (3355)			
1	Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%

2	Terlaksananya sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
4	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pemabayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU.	1 Layanan
Penyelenggaraan Operasional Perkntoran dan Dukungan sarana dan Prasarana (3360)			
1	Terlaksananya Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase kepatuhan dalam tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	80%
		Tersedianya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai Data SAK	1 dokumen
2		Tersedianya Laporan Persediaan (Stock Opname)	1 dokumen
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran Tugas KPU	Layanan Perkantoran	1 Layanan
Pelaksanaan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan			
1	Terlaksananya pengelolaan Program dan anggaran yang efisien dan terintegritas	Persentase Penyusunan perencanaan kegiatan dalam menghadapi Pemilu serentak	80%
		Persentase pencapaian target kinerja sesuai dengan Tahapan Pemilihan	80%
2	Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan Bimbingan Teknis Kepemiluan	Persentase pembelajaran bimtek kepemiluan	80%
		Persentase laporan Realisasi keikutsertaan penyelenggaraan bimtek kepemiluan	80%
3	Tersedianya Sarana Kebutuhan Bidang Teknologi dan Informasi	Pelaksanaan Rapat Pembahasan Sarana IT Pemilu	90%
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarata IT dalam pemilu dan Pilkada	100%
Pembentukan badan AdHoc (6867)			
1	Pembentukan Badan Ad Hoc	Pelaksanaan Rekrutmen KPPS	1 Laporan
2	Honorarium Badan Adhoc	Dukungan Operasional Badan Adhoc	100%

Masa Kampanye Pemilu (6870)			
1	Persiapan Kampanye Pemilu dan Pilkada	Laporan Persiapan Kampanye Pemilu	1 laporan
2	Pengelolaan Kampanye Pemilu dan Pilkada	Pelaksanaan dan Pengelolaan Kampanye Pemilu dan Pilkada	1 Laporan
3	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu	1 laporan
Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)			
1	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Penyusunan daftar Kebutuhan Logistik Pemilu dan Pilkada	
2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan, Pengiriman, pengelolaan, pengawasan produksi, supervisi dan monitoring logistik Pemilu dan Pilkada	100%
3	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rapat, Penyusunan Laporan Pemilu dan Pilkada	
Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)			
1	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%
2	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu dan Pilkada	100%
3	Evaluasi Tungsura	Pelaksanaan Evaluasi Tahapan Tungsura Pemilu dan Pilkada	1 Laporan
Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)			
1	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	Terlaksananya rapat persiapan sumpah janji	1 laporan
2	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Terlaksananya kegiatan sumpah janji	1 laporan
Penetapan Hasil Pemilu (6982)			
1	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu dan Pilkada	Terlaksananya penetapan hasil pemilu dan Pilkada	BA dan SK
2	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu dan Pilkada	Terselesaikannya sengketa penetapan hasil pemilu dan Pilkada	1 laporan

Tabel 2.2 – Penetapan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Rencana Kerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapaian kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta dukungan sarana dan prasarana KPU	Persentase (%) meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU	100 %

2	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	Persentase (%) meningkatnya Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel	100%
---	---	---	---	------

Tabel 3.1 – Target Kinerja 2024

B. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Gunung Mas secara umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
1	Program Dukungan Manajemen				
1.1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten Gunung Mas	100 %	100 %	
1.2	Terpenuhinya keperluan perkantoran sehari-hari sebagai penunjang kegiatan operasional kantor selama 1 (satu) tahun	Persentase pemenuhan sarana dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100 %	
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
2.1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Presentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	100 %	100 %	
2.2	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan	100 %	100 %	

		Penyelenggaraan Pemilu			
2.2	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Pembentukan Badan Adhoc	100 %	100 %	
2.3	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan masa kampanye	100 %	100 %	
2.4	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100 %	100 %	
2.5	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Prosentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam penyelenggaraan kegiatan Bimtek dan Pelatihan penyiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %	100 %	
2.6	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam dukungan proses pelaksanaan Sumpah Janji	100 %	100 %	
2.7	Penetapan Hasil Pemilu	Persentase KPU Kabupaten Gunung Mas dalam Menetapkan Hasil Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas	100 %	100 %	

Pencapaian sasaran kualitas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :

- a. Terlaksananya Pelaksanaan Layanan Perkantoran.

Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, tunjangan khusus bagi komisioner dan pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunung Mas yang dilakukan rutin setiap pada minggu pertama di setiap bulannya.

- b. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).

Adanya supervisi dan pembinaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Tahun Anggaran 2024.

- c. Tersusunnya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.

Penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

- d. Terlaksananya Layanan Perkantoran.

Terfasilitasinya sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai dengan cara belanja keperluan perkantoran, pembayaran langganan daya dan jasa, belanja pemeliharaan kantor, pembayaran operasional kantor, dan pembayaran honor operasional satuan kerja.

- e. Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Penggunaan aplikasi sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) sebagai bentuk akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas.

- f. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi.

Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dimana pada tahun sebelumnya mendapatkan nilai 68.50 dan di tahun ini menjadi 71,70

Pencapaian sasaran kualitas Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi diukur dari :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran yang baik;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi, persiapan dan pelaksanaan pembentukan sampai dengan terseleksinya badan adhoc;

- 3) Pelatihan kepemiluan bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil KPU dan pelatihan satuan pengamanan/jagat saksana;
- 4) Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan persiapan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- 6) Kebijakan/regulasi, keputusan KPU serta penyelesaian pengunggahan produk hukum pada website JDIH KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Penyusunan dokumen pemeliharaan dan inventarisasi logistik eks pemilu dan persiapan pemeliharaan dan inventarisasi persiapan logistik Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- 8) Pengadaan sarana bidang teknologi informasi dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Gunung Mas menggunakan indikator jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 10 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Sedangkan untuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 10 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja terdapat target yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran,

dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 90%	Baik
4	91 % sampai dengan 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Prosentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik prosentase pencapaian kerjanya.

Dari hasil pengukuran kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas, dapat dihitung prosentasi capaian kinerja secara menyeluruh sebesar : **95.06%** sehingga dikategorikan capaian kinerja **Sangat Baik**. Berdasarkan Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 tersebut terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, secara keseluruhan telah mencapai kategori Sangat Baik yakni dengan rentang capaian 91%-100% memenuhi target.

. **Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Hasil Capaian Kinerja yang dicapai oleh KPU Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 adalah sebesar 95,06 %. Adapun perbandingan serapan anggaran selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

TABULASI ANGGARAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	TAHUN	KRO	NAMA KEGIATAN	BESARAN ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2022	6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	750,540,000	744,049,227	99.42
	2023			1,166,101,000	1,085,326,419	93.07
	2024			1,191,810,000	1,172,222,002	98.36
2	2022	6710	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu	570,719,000	569,840,984	99.85
	2023			26,445,000	25,917,000	98,00
	2024			-	-	-
3	2022	6867	Pembentukan badan Adhoc	-	-	-
	2023			16,903,741,000	16,711,857,776	98.86
	2024			9,870,623,000	9,870,621,847	100
4	2022	6870	Masa Kampanye Pemilu	-	-	-
	2023			76,676,000	46,496,642	60.64
	2024			552,674,000	551,769,840	99.84
5	2022	6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	-	-	-
	2023			924,337,000	782,469,442	84.65
	2024			952,059,000	888,886,563	93.36
6	2022	6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	-	-
	2023			45,095,000	22,749,200	50.45
	2024			1,572,222,000	1,572,219,719	100
7	2022	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	56,928,000	56,721,669	99.64
	2023			120,788,000	119,227,340	98.71
	2024			-	-	-
8	2022	6888	Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-
	2023			13,892,000	7,740,960	55.72
	2024			-	-	-
9	2022	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	225,090,000	223,854,850	99.45
	2023			166,725,000	164,248,924	98.51
	2024			-	-	-
10	2022	6890	Pencalonan	60,501,000	59,561,180	98.45

	2023		Presiden dan wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPTD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	313,605,000	298,835,470	95.29
	2024			-	-	-
11	2022	6981	Pengucapan Sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-
	2023			-	-	-
	2024			2,000	-	0
12	2022	6982	Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-
	2023			-	-	-
	2024			2,000	-	0

Hal ini disebabkan terjadinya pergantian disebabkan oleh beberapa hal :

1. tidak adanya sengketa pada saat Pemilu Maupun Pilkada, hal ini juga merupakan salah satu indikator dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang aman dan damai;
2. Pengadaan Logistik yang dilaksanakan oleh tim Konsolidasi UKPBJ Provinsi menghasilkan nilai satuan harga barang kebutuhan logistik yang di bawah perencanaan awal, hal ini juga turut serta dalam mempengaruhi nilai akhir serapan pada tahun anggaran 2024;
3. Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan di tingkat pusat atau daerah yang mendadak dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan rencana penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Hal ini sering terjadi ketika ada perubahan prioritas atau arah pembangunan yang mengharuskan penyesuaian anggaran dalam hal ini adalah pemberian insentif/nilai kepada pegawai PPNPN.
4. Masih terdapat kegiatan dan tahapan Pilkada pada bulan Januari tahun Anggaran 2025 sehingga Pada revisi ke 16 yaitu tanggal 27 desember 2024 KPU Gunung Mas Kembali menurunkan anggaran dengan tujuan untuk

mendapatkan nilai IKPA maksimal yaitu Rp. 2.515.080.000,- pengurangan pagu hibah pilkada ini yang rencananya akan di pagukan Kembali atau direkamkan ulang pada anggaran tahun 2025.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Gunung Mas mendapat pagu sebesar **Rp. 41.469.966.000,-** dengan capaian realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 39.420.68212,-** atau 95.06%, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 39,196,465,000	Rp. 37,185,527,317	94.87%
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,273,501,000	Rp. 2,235,154,895	98.31%
JUMLAH		<i>Rp. 41,469,966,000</i>	<i>Rp. 39,420,682,212</i>	<i>95.06%</i>

Pagu dan Realisasi Program Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 2,160,190,000	Rp. 2,121,844,395	98.22 %
2	Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp. 113,311,000	Rp. 113,310,500	100%

Pagu dan Realisasi Kegiatan (076.01.WA) Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	REALISASI ANGGARAN
1	Terlaksananya Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Rp. 25,054,921,000	Rp. 23,127,654,846	92.3%
2	Terlaksananya Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp. 1,191,810,000	Rp. 1,172,222,002	98.36%
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc (6867)	Rp. 9,870,623,000	Rp. 9,870,623,000	100%
4	Terlaksananya Kegiatan Masa Kampanye Pemilu (6870)	Rp. 552,674,000	Rp. 551,769,840	99,84%
5	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	Rp. 952,059,000	Rp. 888,886,563	93,36%
6	Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Rp. 1,572,222,000	Rp. 1,572,222,000	100%
7	Terlaksananya Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Tidak Menggunakan Anggaran KPU		
8	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Rp 2,154,000	Rp 2,152,500	99,93%

BAB IV

PENUTUP

Dalam mengimplementasikan visi dan misi tahun 2024, KPU Kabupaten Gunung Mas bersandar pada tujuan dan program kerja yang telah ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Tahun 2024 dan Kesepakatan Kinerja Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJ) memaparkan berbagai keberhasilan dan kegagalan pencapaian strategis KPU Kabupaten Gunung Mas tahun 2024. Pencapaian strategis tersebut tercermin dalam pencapaian Key Performance Indicators (KPIs) dan analisis kinerja berdasarkan tujuan.

Semua tujuan dari perjanjian kinerja 2024 tercapai dengan baik. Demikian juga dengan key performance indicator telah terwujud baik. Keberhasilan pencapaian ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh perangkat di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas. Beberapa hal tidak tercapai dalam renstra 2020-2024 terutama target-target yang berhubungan dengan kemampuan keuangan Negara, sehingga tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak sepenuhnya tercapai. Hal-hal yang belum terwujud seharusnya menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas ke depan. Penerapan manajemen kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas perlu ditekankan dan dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ke depan, KPU Kabupaten Gunung Mas akan

melakukan berbagai kegiatan secara sistematis sesuai dengan pelayanan penyelenggara pemilu.

Permasalahan kinerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Beberapa permasalahan kinerja yang sering dihadapi oleh KPU antara lain:

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas: Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di KPU dapat menjadi masalah. SDM yang kurang berpengalaman atau tidak memadai dalam menangani berbagai tahapan pemilu dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan dan ketepatan waktu pelaksanaan tugas. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh KPU RI dengan melaksanakan rekrutment ASN (PNS dan PPPK) pada tahun anggaran 2024 serta tenaga perbantuan penjaga gudang dalam proses pengelolaan logistik selama pemilu dan pemilihan berlangsung
- Tantangan dalam Teknologi dan Infrastruktur: Teknologi informasi yang digunakan untuk pencatatan data pemilih, penghitungan suara, dan hasil pemilu harus dapat diandalkan. KPU perlu memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang ada memadai dan aman dari ancaman cyber atau gangguan teknis yang dapat mengganggu proses pemilu. Dalam hal ini pada pelaksanaan cokolit, pemutakhiran data hingga pelaksanaan rekapitulasi terbantu oleh internet Bakti dan Starlink sehingga dapat mempercepat proses kerja badan adhoc yang perlu menggunakan sistem informasi yang ada guna mendukung jalannya tahapan pemilu dan pemilihan.

- Kontroversi Hasil Pemilu: Setelah pemilu selesai, sering terjadi kontroversi atau sengketa hasil yang memengaruhi kredibilitas KPU. Proses rekapitulasi suara, penghitungan, atau penyelesaian sengketa pemilu yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan publik terhadap KPU. Hal ini sudah ditanggulangi dengan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui info halaman <https://pilkada2024.kpu.go.id/> sehingga dapat menanggulangi keadaan politik yang berpotensi memanas.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang demokratis mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

- **Kontroversi Hasil Pemilu:** Setelah pemilu selesai, sering terjadi kontroversi atau sengketa hasil yang memengaruhi kredibilitas KPU. Proses rekapitulasi suara, penghitungan, atau penyelesaian sengketa pemilu yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan publik terhadap KPU. Hal ini sudah ditanggulangi dengan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui info halaman <https://pilkada2024.kpu.go.id/> sehingga dapat menanggulangi keadaan politik yang berpotensi memanas.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang demokratis mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.